

**PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KESADARAN PERPAJAKAN  
WAJIB PAJAK DAN SISTEM PEMUNGUTAN YANG MELEKAT PADA  
WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PPh ORANG PRIBADI  
(Studi Pada KPP PRATAMA GRESIK UTARA)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Jurusan Akuntansi**



**Diajukan Oleh :**

**DWI JANITA RILDASARI**  
**0713010124/ FE/ EA**

**Kepada**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”  
JAWA TIMUR  
2011**

**PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KESADARAN  
PERPAJAKAN WAJIB PAJAK DAN SISTEM PEMUNGUTAN  
YANG MELEKAT PADA WAJIB PAJAK TERHADAP  
PENERIMAAN PPh ORANG PRIBADI  
(Studi Pada KPP PRATAMA GRESIK UTARA)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**DWI JANITA RILDASARI**  
**0713010124/ FE/ EA**

**Kepada**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”  
JAWA TIMUR  
2011**

**PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KESADARAN PERPAJAKAN  
WAJIB PAJAK DAN SISTEM PEMUNGUTAN YANG MELEKAT PADA  
WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PPh ORANG PRIBADI  
(STUDI PADA KPP PRATAMA GRESIK UTARA)**

**Disusun Oleh :**

**DWI JANITA RILDASARI**  
**0713010124/ FE/ EA**

**Telah dipertahankan dihadapan  
dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
pada tanggal 27 Mei 2011**

**Pembimbing :  
Pembimbing Utama**

**Tim Penguji :  
Ketua**

**Drs. Ec. Hero Priono, MSi, Ak**

**Dr. Indrawati Yuhertiana, MM, Ak**

**Sekretaris**

**Drs. Ec. Sjafi'i, MM, Ak**

**Anggota**

**Drs. Ec. Hero Priono, MSi, Ak**

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”  
Jawa Timur**

**Dr. H. Dhani Ichsanuddin Nur, SE, MM**  
**NIP.19630924 198903 1001**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Perpajakan Wajib Pajak dan Sistem Pemungutan yang melekat pada Wajib Pajak terhadap Penerimaan PPh Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Gresik Utara) “**.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak, maka akan sulit sekali bagi penulis untuk dapat menyusun skripsi ini. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung kelancaran penyusunan skripsi ini. Dengan rasa hormat yang mendalam penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. R. Teguh Soedarto, MP, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Dr. Dhani Ichsanuddin Nur, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

3. Ibu Dr. Sri Trisnaningsih, MSi selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Rina Moestika Setyaningrum, SE, MM selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan selama menuntut ilmu di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Drs. Ec. Hero Priono, MSi, Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk serta pemikiran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Segenap Pimpinan dan Staf KPP Pratama Gresik Utara yang telah memberikan bimbingan dan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kedua Orang Tuaku, kakak dan adik yang sangat saya sayangi dan cintai yang telah memberikan semangat, dukungan dan dorongan moril serta keikhlasan doa yang tiada hentinya.
9. Thank’s to My Love Rendy Julian Trisna, SE yang telah memberikan banyak dukungan, semangat, motivasi, inspirasi, bantuan yang sangat besar serta doanya hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

10. Thank's to teman – teman kampusku “YuRieCheTha” dan teman – teman kostku “Padepokan Wakiti MA I E / 14” yang selama ini menemaniku baik suka maupun duka, terima kasih atas perhatiannya dan dukungan serta doanya.

Penulis juga mengucapkan Terima Kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran sangat penulis harapkan guna meningkatkan mutu dari penulisan skripsi ini. Penulis juga berharap, penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan bagi peneliti lain yang tertarik untuk mendalaminya di masa yang akan datang.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Surabaya, Mei 2011

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAKSI .....</b>	<b>xiii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	 <b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	10
1.3. Tujuan Penelitian .....	10
1.4. Manfaat Penelitian .....	10
 <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	 <b>12</b>
2.1. Penelitian Terdahulu .....	12
2.2. Perbedaan dan Persamaan Penelitian Yang Dilakukan Sekarang Dengan Penelitian Terdahulu.....	18
2.3. Landasan Teori .....	19
2.3.1. Pajak .....	19
2.3.1.1. Definisi Pajak.....	19
2.3.1.2. Fungsi Pajak.....	20

2.3.1.3. Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak.....	20
2.3.1.4. Klasifikasi Pajak.....	24
2.3.1.5. Sistem Pemungutan Pajak .....	25
2.3.2. Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) .....	27
2.3.2.1. Definisi PPh Badan.....	27
2.3.2.2. Subjek Pajak.....	27
2.3.2.3. Objek Pajak.....	29
2.3.2.4. Penghasilan Bukan Objek Pajak.....	31
2.3.2.5. Tarif Pajak.....	33
2.3.3. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Tentang Undang-undang dan Peraturan Perpajakan ( $X_1$ ) Terhadap Penerimaan PPh OP (Y).....	34
2.3.4. Pengaruh Kesadaran Perpajakan Wajib Pajak ( $X_2$ ) Terhadap Penerimaan PPh OP (Y).....	36
2.3.5. Pengaruh Sistem Pemungutan ( $X_3$ ) Terhadap Penerimaan PPh OP (Y).....	38
2.3.6. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak ( $X_1$ ), Kesadaran Perpajakan Wajib Pajak ( $X_2$ ), dan Sistem pemungutan ( $X_3$ ) Terhadap Penerimaan PPh OP (Y).....	41
2.4. Kerangka Pikir .....	42
2.5. Perumusan Hipotesis .....	44



<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel .....	45
3.1.1. Definisi Operasional .....	45
3.1.1.1. Variabel Bebas (X).....	45
3.1.1.2. Variabel Terikat (Y).....	46
3.1.2. Pengukuran Variabel .....	47
3.2. Teknik Penentuan Sampel .....	50
3.2.1. Objek Penelitian .....	50
3.2.2. Populasi .....	50
3.2.3. Sampel .....	50
3.3. Teknik Pengumpulan Data .....	53
3.3.1. Jenis Data .....	53
3.3.2. Pengumpulan Data .....	53
3.4. Uji Kualitas Data .....	54
3.4.1. Uji Validitas .....	54
3.4.2. Uji Reliabilitas .....	55
3.4.3. Uji Normalitas .....	55
3.5. Uji Asumsi Klasik, Teknik Analisis dan Uji Hipotesis .....	56
3.5.1. Uji Asumsi Klasik.....	56
3.5.2. Teknik Analisis .....	60
3.5.3. Uji Hipotesis .....	61
3.5.3.1. Uji Kesesuaian Model.....	61
3.5.3.2. Uji t .....	62

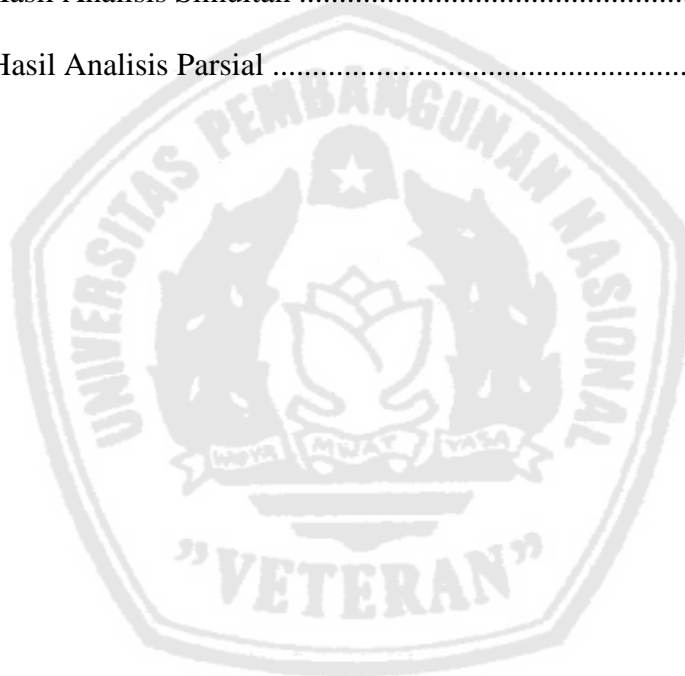
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>63</b>
4.1. Deskripsi Obyek Penelitian .....	63
4.1.1. Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara .....	63
4.1.2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara .....	65
4.1.3. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara.....	66
4.2. Deskripsi Hasil Penelitian .....	70
4.2.1. Deskripsi Variabel Pemahaman Wajib Pajak ( $X_1$ ).....	70
4.2.2. Deskripsi Variabel Kesadaran Perpajakan ( $X_2$ ) .....	72
4.2.3. Deskripsi Variabel Sistem Pemungutan ( $X_3$ ).....	73
4.2.4. Deskripsi Variabel Penerimaan PPh (Y).....	75
4.3. Deskripsi Hasil Pengujian .....	76
4.3.1. Hasil Pengujian Validitas, Reliabilitas, dan Normalitas .....	76
4.3.1.1. Pengujian Validitas.....	76
4.3.1.2. Pengujian Reliabilitas .....	78
4.3.1.3. Pengujian Normalitas .....	80
4.4. Uji Asumsi Klasik .....	81
4.4.1. Uji Multikolinieritas .....	81
4.4.2. Uji Heteroskedastisitas .....	82
4.5. Statistik Deskriptif .....	83

4.6. Analisis Regresi Linier Berganda .....	84
4.7. Uji Hipotesis dan Pembahasan .....	87
4.7.1. Uji Kesesuaian Model .....	87
4.7.2. Uji t .....	88
4.8. Pembahasan Hasil Penelitian .....	90
4.9. Perbedaan Hasil Penelitian Dengan Penelitian Terdahulu ....	94
4.10. Keterbatasan Penelitian .....	95
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>96</b>
5.1. Kesimpulan .....	96
5.2. Saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Gresik Utara tahun 2009 – 2010 .....	6
Tabel 1.2. Data Jumlah Penerimaan PPh di KPP Pratama Gresik Utara tahun 2009 – 2010 .....	7
Tabel 4.1. Rekapitulasi Jawaban Responden mengenai Variabel Pemahaman Wajib Pajak ( $X_1$ ) .....	71
Tabel 4.2. Rekapitulasi Jawaban Responden mengenai Variabel Kesadaran Perpajakan Wajib Pajak ( $X_2$ ).....	72
Tabel 4.3. Rekapitulasi Jawaban Responden mengenai Variabel Sistem Pemungutan ( $X_3$ ) .....	74
Tabel 4.4. Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Penerimaan PPh Orang Pribadi (Y) .....	75
Tabel 4.5. Hasil Uji Validitas Instrumen Kuesioner Variabel Pemahaman Wajib Pajak ( $X_1$ ) .....	76
Tabel 4.6. Hasil Uji Validitas Instrumen Kuesioner Variabel Kesadaran Perpajakan Wajib Pajak ( $X_2$ ) .....	77
Tabel 4.7. Hasil Uji Validitas Instrumen Kuesioner Variabel Sistem Pemungutan ( $X_3$ ) .....	77
Tabel 4.8. Hasil Uji Validitas Instrumen kuesioner Variabel Sistem Pemungutan ( $X_3$ ) .....	78
Tabel 4.9. Hasil Uji Reliabilitas Masing-masing Variabel .....	79

Tabel 4.10. Hasil Normalitas .....	80
Tabel 4.11. Hasil Multikolinearitas .....	82
Tabel 4.12. Hasil Heteroskedastisitas .....	83
Tabel 4.13. Statistik Deskriptif .....	84
Tabel 4.14. Persamaan Regresi .....	85
Tabel 4.15. Uji Kesesuaian Model .....	87
Tabel 4.16. Hasil Analisis Simultan .....	88
Tabel 4.17. Hasil Analisis Parsial .....	89



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Kerangka Pikir.....	43
Gambar 4.1.	Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik utara .....	67



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kuesioner
- Lampiran 2 Data Tabulasi Jawaban Responden
- Lampiran 3.1 Data Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Pemahaman Wajib Pajak ( $X_1$ )
- Lampiran 3.2 Data Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kesadaran Perpajakan Wajib Pajak ( $X_2$ )
- Lampiran 3.3 Data Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Sistem Pemungutan ( $X_3$ )
- Lampiran 4.1 Data Uji Normalitas
- Lampiran 4.2 Data Uji Multikolonieritas dan Data Uji Heteroskedastisitas
- Lampiran 4.3 Persamaan Regresi
- Lampiran 4.4 Uji F dan Uji t

**PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KESADARAN PERPAJAKAN  
WAJIB PAJAK DAN SISTEM PEMUNGUTAN YANG MELEKAT PADA  
WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PPh ORANG PRIBADI  
(Studi Pada KPP PRATAMA GRESIK UTARA)**

**Oleh :**

**DWI JANITA RILDASARI**

**ABSTRAKSI**

Selama ini berlaku anggapan bahwa keberadaan sesuatu Negara ditopang oleh tiga pilar utama, yakni adanya penduduk, wilayah teritorial yang jelas dan adanya pemerintahan yang mendapat pengakuan internasional, namun masih ada pilar yang keempat yang tak kalah penting, yakni topangan sistem perpajakan yang berjalan dengan baik, adil dan bersih. Usaha pemerintah dalam pengoptimalan penerimaan Negara dari sektor pajak ini harus dimulai dengan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat untuk mewujudkannya, dimana Wajib Pajak berkewajiban menghitung besarnya pajak yang terutang dengan benar dan dapat mengisi serta menyampaikan Surat Pemberitahuan secara benar dan tepat waktu guna meningkatkan pemasukan pajak kas Negara dan menunjang peningkatan pertumbuhan perekonomian. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk membuktikan dan menguji secara empiris pengaruh pemahaman Wajib Pajak, kesadaran perpajakan Wajib Pajak, dan sistem pemungutan yang melekat pada Wajib Pajak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan PPh Orang Pribadi.

Populasi dalam penelitian ini adalah 50 Wajib Pajak Pengusaha Kopyah (WP Orang Pribadi) di Kecamatan Gresik. Teknik penentuan ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Purposive Sampling ditemukan sampel berjumlah 32 Wajib Pajak Pengusaha Kopyah (WP Orang Pribadi). Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan uji hipotesis uji kesesuaian model dan uji t.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penelitian ini Pemahaman Wajib Pajak dan Kesadaran Perpajakan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPh Orang Pribadi, sehingga hipotesis penelitian ini terbukti kebenarannya. Sementara untuk Sistem Pemungutan Yang Melekat Pada Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPh Orang Pribadi, sehingga hipotesis penelitian ini tidak terbukti kebenarannya.

**Keyword :** *Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Perpajakan Wajib Pajak, dan Sistem Pemungutan, Penerimaan PPh Orang Pribadi.*



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Selama ini berlaku anggapan bahwa keberadaan sesuatu Negara ditopang oleh tiga pilar utama, yakni adanya penduduk, wilayah teritorial yang jelas dan adanya pemerintahan yang mendapat pengakuan internasional, namun masih ada pilar yang keempat yang tak kalah penting, yakni topanan sistem perpajakan yang berjalan dengan baik, adil dan bersih.

Pajak merupakan suatu fenomena yang menarik dalam kehidupan masyarakat dan Negara, saat ini pajak bukan lagi merupakan sesuatu yang paling asing bagi masyarakat Indonesia, sebagian kalangan telah menempatkan pajak sebagai salah satu kewajiban dalam bernegara, yaitu merupakan sarana untuk ikut berpartisipasi dalam membantu pelaksanaan tugas bernegara yang ditangani oleh pemerintah. Indikasi ini terlihat dari semakin banyaknya jumlah Wajib Pajak, demikian juga keikutsertaan masyarakat dari berbagai kalangan apabila ada penyelenggaraan kegiatan mengenai perpajakan.

Sejarah pemungutan pajak telah ada sejak jaman nenek moyang yang dikenal dengan upeti, yaitu pemberian hasil bumi kepada raja sebagai tanda bakti rakyat kepada raja, hal inilah yang kemudian melatarbelakangi adanya pemungutan pajak. Pada mulanya pajak belum merupakan suatu pungutan, tetapi hanya merupakan pemberian sukarela oleh rakyat kepada

raja dalam memelihara kepentingan Negara, seperti menjaga keamanan Negara, menyediakan jalan umum, membayar gaji pegawai, dan lain sebagainya (Gardina dan Haryanto, 2006: 10).

Usaha pemerintah dalam pengoptimalan penerimaan Negara dari sektor pajak ini harus dimulai dengan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat untuk mewujudkannya, dimana Wajib Pajak berkewajiban menghitung besarnya pajak yang terutang dengan benar dan dapat mengisi serta menyampaikan Surat Pemberitahuan secara benar dan tepat waktu yang tercemin pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Perpajakan No. 9 tahun 1994 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan, yang berbunyi sebagai berikut : ‘Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan’, tetapi mengapa para wajib pajak pada dasarnya tidak mempunyai kerelaan untuk membayar pajak apalagi setelah diketahui uang hasil pajak tidak bisa dirasakan secara langsung manfaatnya (Munari, 2005: 120).

Beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak, terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak yaitu Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembagunan Negara, dengan menyadari hal ini Wajib Pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan Negara guna meningkatkan kesejahteraan warga

negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan Negara. Wajib Pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan Negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib Pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara (Tatiana dan Priyo, 2009: 8-9).

Pada masa sebelum Peraturan Perpajakan tahun 1983 diberlakukan, diterapkan Official Assessment System dimana dalam sistem pemungutan pajak ini memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang, dengan sistem ini wajib pajak bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak, tetapi setelah tahun 1983 berdasarkan Undang-undang Perpajakan Tahun 1983 dan berlaku di Indonesia sejak tahun 1984 sampai sekarang diterapkan Self Assessment System, dimana wajib pajak diberi wewenang penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini wajib pajak aktif, sedangkan fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang

seseorang, kecuali wajib pajak melanggar ketentuan yang berlaku (Google, [www.skripsi.blog.dada.net](http://www.skripsi.blog.dada.net)).

Namun dalam pelaksanaannya, sistem pemungutan pajak berdasarkan sistem Self Assessment ini mengandung banyak kelemahan. Sedangkan hal yang terpenting yang mempengaruhi keberhasilan sistem ini adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka pelaksanaan sistem Self Assessment tersebut, dalam sistem ini Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan fungsinya sebagai fasilitator berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Jeanny Irenne, 2006).

Tujuan Pemerintah dalam melakukan perubahan kebijakan di bidang perpajakan tentunya guna meningkatkan pemasukan pajak kas Negara dan menunjang peningkatan pertumbuhan perekonomian. Kebijakan tersebut (peraturan perundang-undangan perpajakan) seharusnya mengatur sistem perpajakan secara menyeluruh yang sejalan dengan perkembangan perekonomian saat ini dan di masa yang akan datang. Pemerintah dalam menjalankan fungsi pajak (budgetair dan regulierend) salah satunya tentu saja membutuhkan sistem penetapan pajak yang efisien, fleksibel, dan terintegrasi dengan sistem subsistem secara internal dan sistem yang lain secara eksternal (dengan peradilan pajak) dalam menunjang kebijakan pendapatan Negara (fiscal policy) (Sofyan, 2003: 29).

Ditinjau dari fungsinya, pajak dibedakan menjadi dua fungsi yaitu fungsi budgetair (sumber penerimaan negara) dan fungsi regulierend

(mengatur). Fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan, sedangkan fungsi regulierend artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan, dari kedua fungsi ini, pada dasarnya pemerintah ingin kembali menegaskan peranan penting pajak baik sebagai alat penerimaan Negara seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maupun sebagai alat untuk melaksanakan berbagai kebijakan di bidang sosial dan ekonomi (Siti Resmi, 2009: 3).

Pajak penghasilan sebagai suatu pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Salah satu subyek pajak adalah badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun dan bentuk badan usaha lainnya. Dengan demikian, pajak penghasilan badan yang dikenakan terhadap salah satu bentuk usaha tersebut, atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak (Laode Syamri, 2010).

Fenomena yang terjadi sekarang yaitu perkembangan jumlah Wajib Pajak semakin meningkat. Padahal jika dilihat dari realita yang ada, kebanyakan dari masyarakat enggan untuk memenuhi kewajiban kenegaraannya yaitu kewajiban sebagai Wajib Pajak. Bahkan yang terjadi,

sebagian dari mereka berusaha untuk menghindar dari pajak, baik itu perlakuan yang pasif sampai dengan perlakuan yang aktif. Dari realita tersebut nampak berbeda dengan yang terjadi di Kabupaten Gresik dimana penulis menggunakan lokasi tersebut sebagai obyek penelitian. Di Kabupaten Gresik, jumlah WP yang terdaftar dan memenuhi kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Terbukti sampai dengan tahun 2009 hingga sampai dengan tahun 2010, jumlah WP yang memenuhi kewajiban perpajakannya terus meningkat, tampak dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1. : Data Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Gresik Utara tahun 2009 – 2010

<b>Periode</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak Kabupaten Gresik</b>
s/d tahun 2009	35.692 WP
s/d tahun 2010	44.821 WP

Sumber : KPP Pratama Gresik Utara

Tabel 1.2. : Data Jumlah Penerimaan PPh di KPP Pratama Gresik Utara  
tahun 2009 – 2010

<b>Tahun</b>	<b>Target Penerimaan</b>	<b>Realisasi Penerimaan</b>
s/d tahun 2009	311.042.162.064	297.265.357.632
s/d tahun 2010	318.614.602.393	302.837.797.961

Sumber : KPP Pratama Gresik Utara

Dari tabel di atas terlihat bahwa perkembangan jumlah WP semakin meningkat setiap tahunnya. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa seberat apapun atau seterpaksa apapun pemenuhannya, masyarakat tetap berusaha memenuhi kewajiban perpajakannya, baik dengan cara yang melanggar hukum ataupun yang menaati hukum dan peraturan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi dalam pelunasan pajak terhutangnya, Wajib Pajak belum sepenuhnya sadar betul akan sanksi yang ditimbulkan atas keterlambatan pembayaran hutang pajaknya. Sehingga target yang dianggarkan oleh Kantor Pajak Gresik belum tercapai pada tahun 2009 - 2010.

Pemahaman Wajib Pajak atas ketentuan maupun peraturan perpajakan yang berlaku harus lebih ditingkatkan lagi, sehingga Wajib Pajak akan lebih sadar dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak yaitu PPh Orang Pribadi, selain pemahaman dan kesadaran yang dimiliki wajib pajak mengenai perpajakan, sistem pemungutan juga harus

diperhatikan oleh segenap pihak instansi yaitu Kantor Pelayanan Pajak dalam proses pembayaran atau pelunasan pajak.

Sistem pemungutan dalam hal ini birokrasi pembayaran PPh Orang Pribadi yang telah diterapkan ternyata rumit bagi wajib pajak, maka wajib pajak lebih cenderung enggan dalam pembayaran pajak tersebut, dengan adanya kecenderungan ini, maka keberhasilan penerimaan PPh Orang Pribadi menjadi tidak maksimal dan rencana penerimaan pajak yang telah ditargetkan akan menjadi jauh dalam pencapaian (jauh tercapai) atau menurun dari harapan pemerintah.

Menurut Mu'minatus Sholichah dan Istiqomah (2005) dari hasil penelitiannya membuktikan bahwa faktor yang melekat pada wajib pajak yang berupa kesadaran, pemahaman dan kemampuan wajib pajak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, selain itu tidak terlepas dari perilaku wajib pajak itu sendiri yang terbentuk oleh beberapa faktor seperti sikap (attitudes), motivasi (motivation), persepsi (perception), pembelajaran (learning), kepribadian (personality), yang juga dipengaruhi oleh lingkungan dan dasar biologis dari wajib pajak.

Menurut Suryadi (2006) dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak yang diukur dengan persepsi Wajib Pajak, pengetahuan perpajakan, karakteristik Wajib Pajak, penyuluhan perpajakan dan pelayanan perpajakan yang diukur dengan kualitas SDM, ketentuan perpajakan, sistem informasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak, hal ini merupakan cermin dari sikap



pajak bahwa kesadaran Wajib Pajak dan pelayanan perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak, sedangkan kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak, hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengaruh besar terhadap kinerja penerimaan pajak.

Berdasarkan hasil kuesioner penelitian terdahulu oleh Mu'minatus Sholichah dan Istiqomah (2005) jumlah responden 280 orang di 6 kecamatan yang terbagi dalam 56 kelurahan di Gresik, tentang perilaku wajib pajak terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB menyatakan bahwa dari hasil jawaban responden diketahui rata-rata dari variabel kesadaran perpajakan sebesar 3,57%, variabel pemahaman wajib pajak sebesar 3,42%, variabel kemampuan wajib pajak sebesar 3,22%, dan realisasi pembayaran PBB sebesar 39,62%.

Penelitian ini dilakukan kembali (replikasi) karena permasalahan yang akan diteliti belum terjawab/belum terpecahkan oleh peneliti-peneliti terdahulu (masih terjadi konflik), maka peneliti akan menguji kembali apakah terdapat pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran perpajakan wajib pajak dan sistem pemungutan yang melekat pada wajib pajak terhadap penerimaan PPh Orang Pribadi, sehingga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai solusi alternatif dalam pengambilan keputusan untuk memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan pemahaman wajib pajak, kesadaran perpajakan wajib pajak dan sistem pemungutan yang melekat pada wajib pajak terhadap penerimaan PPh Orang Pribadi.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Perpajakan Wajib Pajak dan Sistem Pemungutan Yang Melekat Pada Wajib Pajak Terhadap Penerimaan PPh Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Gresik Utara)”**.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Apakah pemahaman Wajib Pajak, kesadaran perpajakan Wajib Pajak, dan sistem pemungutan yang melekat pada Wajib Pajak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan PPh Orang Pribadi ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Untuk membuktikan dan menguji secara empiris pengaruh pemahaman Wajib Pajak, kesadaran perpajakan Wajib Pajak, dan sistem pemungutan yang melekat pada Wajib Pajak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan PPh Orang Pribadi.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian antara lain dapat memberikan masukan bagi beberapa pihak antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan mengaplikasikan teori – teori perpajakan yang diperoleh selama kuliah, sehingga dapat diterapkan dalam praktek kehidupan di masyarakat.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau masukan tentang indikator-indikator yang mempengaruhi penerimaan PPh Orang Pribadi. Khususnya adalah bagaimana pemahaman Wajib Pajak, kesadaran perpajakan Wajib Pajak, dan sistem pemungutan.

3. Bagi Pihak – pihak lain

Sebagai bahan pertimbangan atau wawasan terutama di bidang perpajakan untuk yang berminat pada pembahasan penelitian ini.

4. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan sesuatu yang berharga bagi pihak Universitas dan juga sebagai bahan referensi bagi penelitian lain dengan materi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti.